



20
23

RANCANGAN AKHIR RENJA

KECAMATAN DENPASAR UTARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Waça karena berkat Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, Rancangan Akhir Renja (RENJA) Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Rancangan Akhir Renja (RENJA) Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2023 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Denpasar Nomor 56 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

Melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka Kecamatan Denpasar Utara menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2023, diharapkan menjadi pedoman dan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di Kecamatan Denpasar Utara.



Denpasar, Juli 2022
Camat Denpasar Utara

Wayan Yusswara, S.STP.M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19770730 199802 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2021 dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Denpasar Utara
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Untuk itu Kecamatan Denpasar Utara yang merupakan salah organisasi perangkat daerah Kota Denpasar sebagai pelaksana teknis kewilayahan. Mempunyai wilayah kerja tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Kecamatan dan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar, serta mengacu kepada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 47 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar, dan terakhir dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 221 dan pasal 229 dimana Kelurahan merupakan perangkat kecamatan telah memeberikan tanggungjawab yang lebih besar.

Melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka Kecamatan Denpasar Utara menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2023, diharapkan menjadi pedoman dan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di Kecamatan Denpasar Utara.

1.2. Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2023, peraturan perundangan yang digunakan sebagai rujukan adalah:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465),
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
10. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2023 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan Kecamatan Denpasar Utara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026, yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Denpasar Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Membrikan gambaran umum mengenai kondisi umum pembangunan kecamatan denpasar utara,
- b. Menyediakan informasi mengenai otensi/kemampuan keuangan kecamatan denpasar utara selama satu tahun kedepan,
- c. Menyediakan informasi dan analisis permasalahan serta isu strategis kecamatan denpasar utara,
- d. sebagai pedoman dan arah pembangunan Kecamatan Denpasar Utara selama satu tahun mendatang.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2023, disusun berdasarkan tata urutan sebagai berikut :

BAB 1 Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB 2 Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB 3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB 5 Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara

Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Denpasar Utara tahun 2021 dalam melaksanakan Kegiatan Pemerintahan, Kecamatan Denpasar Utara mempunyai prioritas pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh.

Keterkaitan dengan pelayanan, Kecamatan Denpasar Utara selalu memberdayakan Masyarakat Kecamatan Denpasar Utara dengan tujuan agar segala aktifitas yang berjalan Wilayah Kecamatan Denpasar Utara lebih baik dan lebih maju. Tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

KECAMATAN DENPASAR UTARA PEMERINTAH KOTA DENPASAR

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN DENPASAR UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	14.374.432.998	-	14.403.722.484	12.780.049.046	89%	14.374.432.998	27.154.482.044	189%
	1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	9.225.315.112	-	9.225.315.112	7.897.420.687	86%	9.225.315.112	17.122.735.799	186%
	1.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	583.847.967	-	758.491.371	716.686.747	94%	583.847.967	1.300.534.714	223%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	10.586.027		41.504.248	37.674.815	91%	10.586.027	48.260.842	456%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	363.216.800		571.576.844	542.429.332	95%	363.216.800	905.646.132	249%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	130.045.740		62.030.679	60.806.600	98%	130.045.740	190.852.340	147%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	55.819.400		59.619.600	52.058.000	87%	55.819.400	107.877.400	193%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.180.000		23.760.000	23.718.000	100%	24.180.000	47.898.000	198%
	1.3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.887.588.167	-	3.771.469.760	3.592.791.952	95%	3.887.588.167	7.480.380.119	192%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	436.600.000		281.000.000	203.312.336	72%	436.600.000	639.912.336	147%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	210.104.598		384.542.400	293.014.000	76%	210.104.598	503.118.598	239%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.240.883.569		3.105.927.360	3.096.465.616	100%	3.240.883.569	6.337.349.185	196%
	1.4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	677.681.752	-	648.446.241	573.149.660	88%	677.681.752	1.250.831.412	185%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	452.881.752		464.735.581	405.671.660	87%	452.881.752	858.553.412	190%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kel. Peguyangan)	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kel. Peguyangan)	224.800.000		183.710.660	167.478.000	91%	224.800.000	392.278.000	175%

	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai SKM	109.762.000	-	255.237.000	206.555.000	81%	109.762.000	316.317.000	288%
	2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	19.762.000	-	65.237.000	22.975.000	35%	19.762.000	42.737.000	216%
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	19.762.000		24.462.000	1.650.000	7%	19.762.000	21.412.000	108%
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		40.775.000	21.325.000	52%	-	21.325.000	#DIV/0!
	2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	90.000.000	-	190.000.000	183.580.000	97%	90.000.000	273.580.000	304%
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	90.000.000		190.000.000	183.580.000	97%	90.000.000	273.580.000	304%
	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	1.200.885.510	-	1.631.915.660	1.585.075.000	97%	1.200.885.510	2.785.960.510	232%
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	549.363.620		954.834.410	910.879.400	95%	549.363.620	1.460.243.020	266%
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4.345.800		1.849.650	1.827.000	99%	4.345.800	6.172.800	142%
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	647.176.090		675.231.600	672.368.600	100%	647.176.090	1.319.544.690	204%
	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		498.278.470	-	441.806.160	438.031.400	99%	498.278.470	936.309.870	188%
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-	498.278.470		441.806.160	438.031.400	99%	498.278.470	936.309.870	188%
	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		41.502.000	-	-	-	0%	41.502.000	41.502.000	100%
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Peningkatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	37.302.000				0%	37.302.000	37.302.000	100%
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4.200.000				0%	4.200.000	4.200.000	100%
	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		29.100.000	-	13.000.000	12.900.000	99%	29.100.000	42.000.000	144%
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	29.100.000		13.000.000	12.900.000	99%	29.100.000	42.000.000	144%

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai dengan bulan Nopember 2021 adalah sebagai berikut :
 - a. Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait target 100% realisasi 6,75%
 - b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pemangunan di kelurahan target 100% realisasi 50,12%
 - c. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa target 100% realisasi 48,46%

- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai dengan bulan Nopember 2021 adalah sebagai berikut :
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target 92,16% terealisasi 82,11%
 - b. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan target 100% terealisasi 94,65%

- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak diketemukan program/kegiatan yang melebihi target kinerja sampai dengan bulan nopember 2021;

- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/hasil adalah sebagai berikut :
 - a. terjadinya beberapa kali refofusing anggaran yang menyebabkan beberapa program/kegiatan tidak dapat dilaksanakan,
 - b. adanya kebijakan PPKM dari pemerintah yang menyebabkan kegiatan perjalanan dinas tidak dilaksanakan serta Forum Perangkat Daerah,
 - c. masih adanya program/kegiatan yang dalam proses pengajuan spj belanja.

- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara adalah sebagai berikut:
 - a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara tahun 2021-2026 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat kecamatan denpasar utara pada umumnya,
 - b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utaraberdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan kecamatan denpasar utara.

- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan,
 - b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan/Kelurahan dan Desa

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah kecamatan Denpasar utara dapat dilihat pada table 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Denpasar Utara
Kota Denpasar

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				2020	2021	2022	2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(11)	(12)	(13)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	100%	100%	95%	95%	95%	95%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kuntr. Camat)		Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	6 orang	6 orang	6 orang	6 Orang	-	-	6 orang	6 orang	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kantor Camat)		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor	100%	100%	100%	100%	85%	85%	90%	90%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kel. Tonja)		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor	100%	100%	100%	100%	85%	85%	90%	90%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kel. Ubung)		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor	100%	100%	100%	100%	85%	85%	90%	90%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kel. Peguyangan)		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor	100%	100%	100%	100%	85%	85%	90%	90%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kantor Camat)		Persentase penyediaan jasa dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	75%	80%	90%	90%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kel. Tonja)		Persentase penyediaan jasa dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	75%	80%	90%	90%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kel. Ubung)		Persentase penyediaan jasa dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	75%	80%	90%	90%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kel. Peguyangan)		Persentase penyediaan jasa dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	75%	80%	90%	90%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kantor Camat)		Persentase pemeliharaan barang dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	85%	85%	90%	90%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kel. Tonja)		Persentase pemeliharaan barang dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	85%	85%	90%	90%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kel. Ubung)		Persentase pemeliharaan barang dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	85%	85%	90%	90%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kel. Peguyangan)		Persentase pemeliharaan barang dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	85%	85%	90%	90%	

2	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik											
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di kecamatan	100%	100%	100%	100%	85%	85%	80%	80%	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase pelaksanaan urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat	100%	100%	100%	100%	80%	80%	80%	80%	
3	Program Pernerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan											
	Kegiatan Pernerdayaan Kelurahan Tonja		Persentase pernerdayaan kelurahan	100%	100%	100%	100%	90%	90%	85%	85%	
	Kegiatan Pernerdayaan Kelurahan Ubung		Persentase pernerdayaan kelurahan	100%	100%	100%	100%	90%	90%	85%	85%	
	Kegiatan Pernerdayaan Kelurahan Peguyangan		Persentase pernerdayaan kelurahan	100%	100%	100%	100%	90%	90%	85%	85%	
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum											
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Kantor Camat)		Persentase penduduk yang tertib administrasi	100%	100%	100%	100%	95%	95%	90%	90%	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Kel. Tonja)		Persentase penduduk yang tertib administrasi	100%	100%	100%	100%	95%	95%	90%	90%	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Kel. Ubung)		Persentase penduduk yang tertib administrasi	100%	100%	100%	100%	95%	95%	90%	90%	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Kel. Peguyangan)		Persentase penduduk yang tertib administrasi	100%	100%	100%	100%	95%	95%	90%	90%	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum											
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase penyelenggaraan pemerintahan sesuai penugasan kepala daerah	100%	100%	100%	100%	95%	95%	90%	90%	
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											
	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Kantor Camat)		Persentase realisasi pengelolaan keuangan dan aset desa	100%	100%	100%	100%	85%	85%	85%	85%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pertimbangan atas informasi yang tersirat dalam arah kebijakan di tingkat nasional, regional, dan juga dalam visi, misi, serta program kepala daerah terpilih merupakan faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan untuk merumuskan isu strategis pembangunan 5 tahun ke depan. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan isu strategis pembangunan jangka menengah Kecamatan Denpasar Utara sebagai berikut:

“Belum Optimalnya Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Denpasar Utara”

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Utara serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Denpasar. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Review terhadap rancangan awal RKPD Kecamatan Denpasar Utara dapat dilihat pada table 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
Kota Denpasar

No.	Rencana Kerja Tahun 2022					Hasil Analisa Kebutuhan 2023					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Denpasar Utara	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	14.374.432.998	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Denpasar Utara	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	Rp 15.440.405.765	
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100%	9.225.315.112	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN		Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100%	Rp 8.551.822.988	
1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	583.847.967	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp 1.367.075.913	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	100%	10.586.027	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan		Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	100%	Rp 15.630.981	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	363.216.800	Persentase pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	Rp 1.097.497.607	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Persentase Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	100%	130.045.740	Persentase Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		Persentase Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	100%	Rp 130.308.798	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Persentase Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100%	55.819.400	Persentase Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		Persentase Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100%	Rp 97.598.527	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Persentase Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan	100%	24.180.000	Persentase Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan		Persentase Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan	100%	Rp 26.040.000	

1.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	3.887.588.167	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp 4.415.519.444	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	436.600.000	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	Rp 375.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	210.104.598	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	Rp 422.460.465	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	3.240.883.569	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	Rp 3.618.058.979	
1.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	677.681.752	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 1.105.987.420	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	452.881.752	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	Rp 482.877.420	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	224.800.000	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp 623.110.000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Denpasar Utara	Nilai SKM	80%	109.762.000	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kecamatan Denpasar Utara	Nilai SKM	83%	Rp 91.289.600	
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 belanja	19.762.000	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	Rp 47.464.600	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Persentase Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100%	19.762.000	Persentase Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Persentase Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100%	Rp 17.964.600	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	-	Persentase Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	Rp 29.500.000	

2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	90.000.000	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	Rp 43.825.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	100%	90.000.000	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	100%	Rp 43.825.000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Denpasar Utara	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	1.200.885.510	Program Pemerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Denpasar Utara	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	Rp 1.744.173.942	
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	549.363.620	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	Rp 838.811.188	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	4.345.800	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	Rp 3.780.628	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Persentase Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100%	647.176.090	Persentase Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Persentase Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100%	Rp 901.582.126	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Denpasar Utara		100%	498.278.470	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Denpasar Utara		100%	Rp 612.157.456	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Persentase Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100%	498.278.470	Persentase Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Persentase Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100%	Rp 612.157.456	

5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Denpasar Utara		100%	41.502.000		Kecamatan Denpasar Utara		100%	Rp 96.556.495	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Persentase Peningkatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100%	37.302.000	Persentase Peningkatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Denpasar Utara	Persentase Peningkatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100%	Rp 52.531.495	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Persentase Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100%	4.200.000	Persentase Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Persentase Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100%	Rp 44.025.000	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Denpasar Utara		100%	29.100.000		Kecamatan Denpasar Utara		100%	Rp 11.100.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Persentase Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100%	29.100.000	Persentase Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Persentase Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100%	Rp 11.100.000	

2.5 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan para pemangku kepentingan perangkat daerah kecamatan Denpasar Utara Tahun 2023 dapat dilihat pada table 2.4 berikut ini :

TABEL 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2023 KOTA DENPASAR

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Denpasar Utara	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 15.440.405.765	
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	Rp 8.551.822.988	
1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.367.075.913	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Rp 15.630.981	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 1.097.497.607	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Persentase Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Rp 130.308.798	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Persentase Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 97.598.527	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Persentase Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan	Rp 26.040.000	
1.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 4.415.519.444	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 375.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 422.460.465	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 3.618.058.979	
1.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.105.987.420	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 482.877.420	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 623.110.000	

2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Denpasar Utara	Nilai SKM	Rp	91.289.600	
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp	47.464.600	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Persentase Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp	17.964.600	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp	29.500.000	
2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp	43.825.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Rp	43.825.000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Denpasar Utara	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	Rp	1.744.173.942	
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan		Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp	838.811.188	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp	3.780.628	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Persentase Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp	901.582.126	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Denpasar Utara		Rp	612.157.456	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Persentase Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp	612.157.456	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Denpasar Utara		Rp	96.556.495	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Persentase Peningkatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp	52.531.495	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Persentase Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp	44.025.000	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Denpasar Utara		Rp	11.100.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Persentase Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp	11.100.000	

BAB III

Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja daripada setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kota, Provinsi maupun Kebijakan Nasional, maka Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Denpasar Utara guna menunjang Pembangunan Kota Denpasar secara keseluruhan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim investasi dan Iklim usaha.
8. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
9. Kebudayaan
10. Kreativitas dan inovasi
11. Politik, hukum dan keamanan dan ketertiban
12. Perekonomian
13. Kesejahteraan rakyat.

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kota Denpasar sesuai dengan visi yang akan ditetapkan nantinya.

Kecamatan Denpasar Utara sebagai perangkat daerah Kota Denpasar memiliki peran yang sangat penting karena sebagai pelaksana teknis kewilayahan Camat sebagai kepala Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. Sebagai pelaksana teknis kewilayahan Pemerintah Kecamatan Denpasar Utara memiliki ruang lingkup tugas : Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di kecamatan, koordinasi atas kegiatan instansi-instansi di wilayah kecamatan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, pelayanan dan sebagainya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Dengan berlandaskan Visi dan Misi Kota Denpasar Tahun 2021-2026, Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara memiliki tujuan sebagai berikut :

“Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik”

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dengan berlandaskan Visi dan Misi Kota Denpasar Tahun 2021-2026, Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara memiliki sasaran sebagai berikut :

“Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik”

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada table dibawah ini :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	80 (Baik)	83 (Baik)	86 (Baik)	89 (Baik)	92 (Baik)

3.3 Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan terhadap program dan kegiatan perangkat daerah kecamatan Denpasar utara ditempuh melalui 5 (lima) strategi sesuai tupoksi antara lain :
 - a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
 - b. Meningkatkan Pemberdayaan di Masyarakat
 - c. Meningkatkan Pengendalian Terhadap Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - d. Meningkatkan Koordinasi Kewenangan Pemerintah di Kecamatan Denpasar Barat
 - e. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan di Pemerintahan Desa

- b. Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara meliputi :
- Jumlah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang diusulkan Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara berjumlah 6 program, 10 kegiatan dan 20 sub kegiatan,
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara terdiri dari 3 Wilayah Kelurahan dan 8 Wilayah Desa Administratif.
- c. Tabel rencana program/kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini :

TABEL 3.1

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR TAHUN 2023**

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN DENPASAR UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju (Tahun 2024)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Bahan / Pagu indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	KECAMATAN DENPASAR UTARA								
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Denpasar Utara	100%	Rp 15.440.405.765			100%	Rp 16.984.446.342
	Administarsi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN		100%	Rp 8.551.822.988			100%	Rp 9.407.005.287
	Administarsi Umum Perangkat Daerah	Administarsi Umum Perangkat Daerah		100%	Rp 1.367.075.913			100%	Rp 1.503.783.504
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan		100%	Rp 15.630.981	APBD		100%	Rp 17.194.079
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	Rp 1.097.497.607	APBD		100%	Rp 1.207.247.368
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tersedianyan Peralatan Rumah Tangga		100%	Rp 130.308.798	APBD		100%	Rp 143.339.678
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Tersedianyan Barang Cetak dan Penggandaan		100%	Rp 97.598.527	APBD		100%	Rp 107.358.380
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Tersedianyan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan		100%	Rp 26.040.000	APBD		100%	Rp 28.644.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	Rp 4.415.519.444			100%	Rp 4.857.071.388
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%	Rp 375.000.000	APBD		100%	Rp 412.500.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	Rp 422.460.465	APBD		100%	Rp 464.706.512
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100%	Rp 3.618.058.979	APBD		100%	Rp 3.979.864.877

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp 1.105.987.420			100%	Rp 1.216.586.162
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100%	Rp 482.877.420	APBD		100%	Rp 531.165.162
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kel. Peguyangan)	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kel. Peguyangan)		100%	Rp 623.110.000	APBD		100%	Rp 685.421.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai SKM	Kecamatan Denpasar Utara	83%	Rp 91.289.600			86%	Rp 100.418.560
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		2 belanja	Rp 47.464.600			2 belanja	Rp 52.211.060
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		100%	Rp 17.964.600	APBD		100%	Rp 19.761.060
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	Rp 29.500.000	APBD		100%	Rp 32.450.000
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100%	Rp 43.825.000			100%	Rp 48.207.500
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		100%	Rp 43.825.000	APBD		100%	Rp 48.207.500
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	Kecamatan Denpasar Utara	100%	Rp 1.744.173.942			100%	Rp 1.918.591.336
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100%	Rp 838.811.188	APBD		100%	Rp 922.692.307
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		100%	Rp 3.780.628	APBD		100%	Rp 4.158.691
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		100%	Rp 901.582.126	APBD		100%	Rp 991.740.339

			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Kecamatan Denpasar Utara	100%	Rp 612.157.456			100%	Rp 673.373.202
			Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		100%	Rp 612.157.456	APBD		100%	Rp 673.373.202
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Kecamatan Denpasar Utara	100%	Rp 96.556.495			100%	Rp 106.212.145
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Peningkatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		100%	Rp 52.531.495	APBD		100%	Rp 57.784.645
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		100%	Rp 44.025.000	APBD		100%	Rp 48.427.500
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Kecamatan Denpasar Utara	100%	Rp 11.100.000			100%	Rp 12.210.000
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan		100%	Rp 11.100.000	APBD		100%	Rp 12.210.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Denpasar Utara selain sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan dan pendanaan untuk tahun 2023 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Denpasar Utara. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2023 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia, dapat dilihat pada Tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1				
Rencana Program / Kegiatan dan Pendanaan				
Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar Tahun 2023				
No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	Rp 15.440.405.765
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100%	Rp 8.551.822.988
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp 1.367.075.913
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	100%	Rp 15.630.981
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	Rp 1.097.497.607
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	100%	Rp 130.308.798
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100%	Rp 97.598.527
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	100%	Rp 26.040.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 4.415.519.444
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	Rp 375.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	Rp 422.460.465
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	Rp 3.618.058.979
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 1.105.987.420
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	Rp 482.877.420
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kel. Peguyangan)	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kel. Peguyangan)	100%	Rp 623.110.000

2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai SKM	100%	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 belanja	Rp 47.464.600
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	100%	Rp 17.964.600
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	Rp 29.500.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	Rp 43.825.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	100%	Rp 43.825.000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	Rp 1.744.173.942
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	Rp 838.811.188
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	Rp 3.780.628
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100%	Rp 901.582.126
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	Rp 612.157.456
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100%	Rp 612.157.456
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100%	Rp 96.556.495
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Peningkatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100%	Rp 52.531.495
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100%	Rp 44.025.000
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100%	Rp 11.100.000
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100%	Rp 11.100.000

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Visi dan Misi Walikota

➤ Visi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 adalah :

“**Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju**” merupakan sinergitas dengan visi “**Nangun Sat Kerthi Loka Bali**” dengan pola pembangunan semesta berencana guna mewujudkan kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju dengan konsep “*Vasudhaiva Kutumbakam*” (Menyama Braya),

➤ Misi Kota Denpasar Tahun 2021-2026 anatara lain :

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana.
3. Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.
5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2023 yang memuat kebijakan program/kegiatan dan pendanaan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Denpasar Utara. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Denpasar Utara di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Denpasar Utara berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2023 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Denpasar Tahun 2022.
 - b. Kecamatan Denpasar Utara berkewajiban untuk menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2023 dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2022 dan RKPD Kota Denpasar Tahun 2022.

- c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2023, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2022.

Disamping itu Renja Kecamatan Denpasar Utara juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Semoga keberadaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kecamatan Denpasar Utara serta memberikan manfaat bagi Proses Perencanaan Pembangunan Kota Denpasar.